Nomor : 3285 /1/HK.00.03/8/2025
Tanggal : 7 Agustus 2025

ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
1.	untuk mengoptimalkan karang taruna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;	Terdapat regulasi terkait penyelenggaraan karang taruna yang telah disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan hukum saat ini.	Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan: 1. Pancasila, Sila ke-4, butir 3 dan 4; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara	1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna; 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.	Tidak Ada	Peraturan Menteri Sosial ini terdapat beberapa perubahan dan penambahan pengaturan, meliputi: 1. ketentuan umum; 2. ruang lingkup; 3. prinsip; 4. kedudukan karang taruna; 5. pembentukan unit teknis pengurus karang taruna; 6. keanggotaan karang taruna; 7. tingkat kepengurusan karang taruna; 8. forum pengambilan keputusan karang taruna; 9. syarat pengurus karang taruna; 10. prosedur pembentukan kepengurusan karang

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
			Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial.			taruna; 11. temu karya karang taruna; 12. majelis pertimbangan karang taruna; 13. pembina karang taruna; dan 14. tanggung jawab menteri sosial, gubernur, bupati/wali kota, dan pengurus karang taruna.

Sekretaris Jenderal,



Robben Rico